

25 Jamaah Haji Buton Selatan 2026 Resmi Dilepas Bupati H Muh Adios, Ingatkan Jaga Niat dan Kesehatan, Doakan Jadi Haji Mabrur



Laporan: Ardi, Baubau Post-Durasi Times

BUTON SELATAN, BP- Pemerintah Kabupaten Buton Selatan secara resmi melepas calon jamaah haji tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi dalam sebuah seremoni yang berlangsung khidmat, hangat, dan penuh nuansa spiritual, Selasa. Acara ini dipimpin langsung oleh Bupati Buton Selatan, H Muhammad Adios bersama jajaran Forkopimda dan organisasi perangkat daerah.

Pelepasan tersebut menjadi momentum penting yang menandai dimulainya perjalanan suci para jamaah menuju Tanah Suci. Tidak hanya menjadi

Lanjut ke Hal: 7

BPMD Busel Rampungkan Administrasi Pengisian Jabatan 15 Kades, Rencana Dilantik 6 Mei 2026



Pelaksana Tugas Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (BPMD) Basri

Laporan: Ardi

BUTON SELATAN, BP- Pemerintah Kabupaten Buton Selatan menegaskan komitmennya menjaga stabilitas pemerintahan desa dengan memastikan tidak ada kekosongan kepemimpinan, menyusul berakhirnya masa jabatan 15 kepala desa pada 15 April 2026.

Langkah antisipatif dilakukan melalui penun-

jukan penjabat (Pj) kepala desa dari kalangan aparatur sipil negara (ASN) yang dinilai siap menjalankan roda pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat desa.

Pelaksana Tugas Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (BPMD) Basri, mengungkapkan bahwa seluruh proses administratif pengisian jabatan telah diselesaikan dan kini tinggal menunggu pelantikan

resmi.

“Seluruh tahapan administrasi sudah rampung. Kami tinggal menunggu jadwal pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan,” kata Basri, Selasa (5/5/2026).

Pelantikan para penjabat kepala desa tersebut direncanakan berlangsung pada Rabu, 6 Mei 2026, dengan mempertimbangkan kesiapan teknis dan

Lanjut ke Hal: 7

Bupati Buton Tengah Azhari Dorong Ekonomi Kreatif Jadi Motor Pembangunan Daerah



Komitmen Pemerintah Kabupaten Buton Tengah dalam menjadikan ekonomi kreatif sebagai penggerak utama pembangunan

Laporan: Prasetyo M

BUTON TENGAH BP-Komitmen Pemerintah Kabupaten Buton Tengah dalam menjadikan ekonomi kreatif sebagai penggerak utama pembangunan kembali ditegaskan oleh Bupati Buton Tengah, Dr. H. Azhari, S.STP., M.Si. Hal itu disampaikan dalam kegiatan Camping Kreatif yang digelar Buton Tengah Creative (BTC) di Pantai Sausumangka, Desa Balobone, Kecamatan Mawasangka, Jumat malam (1/5/2026).

Kegiatan yang menghadirkan sekitar 152 pelaku ekonomi kreatif

dari wilayah Kepulauan Buton dan Muna tersebut menjadi ruang strategis untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor sekaligus merumuskan arah pengembangan ekonomi berbasis kreativitas lokal.

Dalam forum diskusi yang berlangsung terbuka, para peserta terlibat aktif menyampaikan gagasan, pengalaman, serta tantangan yang dihadapi dalam mengembangkan usaha kreatif di daerah.

Bupati Azhari menilai forum seperti ini penting karena mampu mempertemukan berbagai pemangku kepentingan dalam satu ruang dialog

yang produktif.

“Pembangunan daerah ke depan tidak hanya bertumpu pada sektor konvensional, tetapi harus didukung oleh kreativitas yang adaptif terhadap perkembangan zaman,” ujar Azhari.

Ia menegaskan bahwa ekonomi kreatif bukan sekadar aktivitas produksi, melainkan ruang tumbuhnya ide, inovasi, dan kolaborasi yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi baru.

“Ekonomi kreatif bukan sekadar aktivitas produksi, tetapi ruang tum-

Lanjut ke Hal: 7

SMPN 1 Batauga Sukses Jadi Lokasi Penyelenggaraan Hardiknas 2026, Guru Dorong Peningkatan Fasilitas Sekolah

Laporan: Firman

BUTON SELATAN, BP- Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) di SMP Negeri 1 Batauga, Kabupaten Buton Selatan, tidak hanya menjadi agenda seremonial tahunan, tetapi juga momentum refleksi atas kualitas sarana pendidikan. Di tengah kesiapan sekolah sebagai lokasi kegiatan tingkat daerah, para guru berharap adanya peningkatan fasilitas demi menunjang proses belajar mengajar.

Momentum Hardiknas yang diperingati setiap 2 Mei tersebut berakar dari kelahiran tokoh pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, yang dikenal sebagai pelopor sistem pendidikan modern di Indonesia. Secara historis, peringatan ini telah menjadi simbol komitmen negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa sejak ditetapkan pada 1959.



Guru SMPN 1 batauga Arius S.Pd,

Dalam konteks global, perhatian terhadap kualitas pendidikan juga menjadi agenda penting, sejalan dengan tujuan UNESCO yang mendorong pendidikan inklusif dan berkualitas bagi semua. Hal ini menunjukkan bahwa isu peningkatan fasilitas pendidikan bukan hanya persoalan lokal, melainkan bagian dari tantangan internasional.

Di SMP Negeri 1 Batauga, proses pembelajaran sejauh ini tetap berlangsung lancar dan kondusif. Para siswa

mengikuti kegiatan belajar tanpa hambatan berarti, meskipun masih terdapat keterbatasan pada beberapa sarana pendukung.

“Alhamdulillah, pembelajaran berjalan seperti biasa, tidak ada hambatan,” ujar Arius S.Pd, salah satu guru di sekolah tersebut.

Kondisi tersebut tidak terlepas dari upaya pihak sekolah dalam menjaga lingkungan belajar tetap aman dan nyaman. Berbagai langkah dilakukan untuk memastikan siswa dapat belajar secara optimal.

Di sisi lain, kesiapan sekolah dalam sukseskan Hardiknas terlihat dari berbagai persiapan yang dilakukan secara menyeluruh. Penataan lingkungan hingga pembersihan area sekolah menjadi fokus utama menjelang pelaksanaan kegiatan.

Lanjut ke Hal: 7

25 Jamaah Haji Buton Selatan 2026 Resmi Dilepas Bupati H Muh Adios, Ingatkan Jaga Niat dan Kesehatan, Doakan Jadi Haji Mabrur

kebahagiaan bagi para calon jamaah, kegiatan ini juga menjadi kebanggaan bagi pemerintah daerah dan masyarakat Buton Selatan.

Dalam sambutannya, Bupati menegaskan bahwa ibadah haji merupakan perjalanan yang tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga spiritual yang menuntut kesiapan mental, kesabaran, dan keikhlasan yang mendalam. "Keberangkatan ini bukan sekadar perjalanan jasmani, tetapi perjalanan rohani yang menuntut keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT," ujar Bupati dalam sambutannya.

Ia juga mengingatkan pentingnya meluruskan niat selama menjalankan ibadah haji. Menurutnya, niat yang tulus menjadi fondasi utama dalam meraih predikat haji mabrur. Selain itu, Bupati menyoroti pentingnya menjaga kondisi kesehatan selama berada di Tanah Suci, mengingat perbedaan iklim dan aktivitas ibadah yang cukup padat.

"Saya mengimbau seluruh jamaah agar menjaga kesehatan fisik dan mental, serta segera berkoordinasi dengan petugas kesehatan apabila mengalami gangguan," katanya. Bupati turut

membagikan pengalaman pribadinya saat menunaikan ibadah haji 14 tahun silam. Ia menekankan bahwa koordinasi dan kepatuhan terhadap petugas sangat membantu kelancaran ibadah.

"Saya pernah merasakan hal yang sama. Jika ada keluhan, segera sampaikan kepada petugas. Mereka sudah disiapkan untuk membantu. Saya 14 tahun yang lalu pernah merasakan seperti itu. Kalau ada rasa-rasa sedikit cepat koordinasi dengan petugas kesehatan. Di sana sudah disiapkan segalanya. Ini pengalaman waktu itu saat ditunjuk jadi ketua pengurus jamaah. Jadi tugas saya mendahulukan jamaah haji baru saya., "ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, ia juga menekankan pentingnya menjaga kekompakan dan solidaritas antar-jamaah, khususnya dalam membantu jamaah lanjut usia selama pelaksanaan ibadah.

"Jaga kebersamaan dan saling tolong-menolong. Bapak dan ibu membawa nama daerah, jadi tunjukkan sikap yang baik," ujarnya. Lebih jauh, Bupati menitipkan pesan agar para jamaah turut mendoakan Kabupaten Buton Selatan

di tempat-tempat mustajab selama menjalankan ibadah haji.

"Doakan daerah kita agar selalu dilindungi, diberikan kesejahteraan, dan kemajuan pembangunan," katanya.

Secara historis, penyelenggaraan ibadah haji telah menjadi bagian penting dalam kehidupan umat Islam di Indonesia sejak abad ke-19, bahkan jauh sebelum kemerdekaan. Indonesia sendiri merupakan negara dengan jumlah jamaah haji terbesar di dunia, dengan kuota yang setiap tahunnya ditetapkan oleh Pemerintah Arab Saudi.

Dalam konteks global, ibadah haji menjadi salah satu pertemuan keagamaan terbesar di dunia yang mempertemukan jutaan umat Islam dari berbagai negara. Data internasional menunjukkan bahwa jumlah jamaah haji setiap tahun dapat mencapai lebih dari dua juta orang, menjadikannya simbol persatuan umat Islam lintas bangsa.

Sementara itu, secara nasional, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama terus melakukan peningkatan layanan haji dari tahun ke tahun, termasuk dalam aspek kesehatan, transportasi, dan akomodasi jamaah.

Di Buton Selatan sendiri, pelepasan jamaah haji menjadi tradisi tahunan yang selalu dilaksanakan secara

khidmat, sebagai bentuk dukungan moral dan spiritual pemerintah daerah kepada warganya yang akan menunaikan ibadah. Acara pelepasan berlangsung dalam suasana penuh keakraban. Sesekali, Bupati menyampaikan candaan ringan yang membuat suasana menjadi lebih cair dan penuh senyum.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Asisten III Sekretariat Daerah, para kepala OPD, unsur TNI-Polri, serta organisasi kemasyarakatan seperti PKK, Dharma Wanita Persatuan, dan Dekranasda.

Di penghujung acara, Bupati secara resmi melepas keberangkatan jamaah haji dengan harapan seluruh jamaah dapat menjalankan ibadah dengan lancar dan kembali dalam keadaan sehat serta memperoleh predikat haji mabrur. "Akhirnya kita memphon ridho Allah SWT... bismilahirrahmaniromh..dengan ini saya nyatakan Jamah Haji Buton Selatan 2026 di lepas dengan resmi. Sebagai penutup mari kita aminkan doa dan harapan dalam pantun berikut ini:

"Mengutai doa di malam kelam, mohon ridho sang maha penyayang, doa kami setulus alam, Selamat Jalan Jamah Yang Tersayang" (*)

government ditunjuk untuk menjamin kesinambungan administrasi hingga pemimpin definitif terpilih.

Dengan kebijakan ini, Pemerintah Kabupaten Buton Selatan berharap pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal tanpa gangguan, sekaligus menjaga keberlangsungan program pembangunan desa.

Upaya tersebut dinilai penting untuk memastikan bahwa transisi kepemimpinan di tingkat desa tidak menghambat aktivitas pemerintahan maupun pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. (*)

SMPN 1 Batauga Sukses Jadi Lokasi Penyelenggaraan Hardiknas 2026, Guru Dorong Peningkatan Fasilitas Sekolah

"Biasanya kami bersihkan lingkungan sekolah, rumput dipotong, dan semuanya disterilkan agar kegiatan berjalan baik," kata Arius.

Sekolah yang kerap dipercaya sebagai lokasi kegiatan tingkat daerah ini dinilai memiliki rekam jejak yang baik dalam penyelenggaraan acara. Kepercayaan tersebut menjadi dorongan bagi seluruh warga sekolah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan.

"Kalau di sekolah, kami selalu siap. Apa pun kegiatan dari daerah, kami tetap membantu dan mendukung," ujarnya menambahkan.

Namun demikian, Arius mengungkapkan masih terdapat sejumlah gedung sekolah yang membutuhkan rehabilitasi lanjutan. Ia berharap pemerintah daerah dapat memberikan perhatian lebih terhadap kebutuhan tersebut.

"Sebagian gedung sudah direhab, tapi masih ada beberapa yang perlu perbaikan. Harapan kami ke depan bisa dipenuhi," ungkapnya.

Menurutnya, peningkatan sarana dan prasarana menjadi faktor penting dalam menunjang kualitas pendidikan, sejalan dengan semangat Hardiknas yang menekankan pemerataan

akses dan mutu pendidikan.

Ke depan, para tenaga pendidik di SMP Negeri 1 Batauga berkomitmen untuk terus menjaga kualitas pembelajaran. Mereka berharap dukungan pemerintah dan masyarakat dapat memperkuat upaya menciptakan generasi yang unggul.

Momentum Hardiknas pun menjadi pengingat bahwa pendidikan bukan hanya tanggung jawab sekolah, melainkan seluruh elemen bangsa. Dengan kolaborasi yang baik, peningkatan kualitas pendidikan di daerah diharapkan dapat terus terwujud. (*)

Bupati Buton Tengah Azhari Dorong Ekonomi Kreatif Jadi Motor Pembangunan Daerah

buhnya ide, inovasi, dan kolaborasi. Buton Tengah harus menjadi bagian dari ekosistem itu," katanya.

Menurut Azhari, sektor ekonomi kreatif memiliki potensi besar dalam menciptakan lapangan kerja baru sekaligus memperkuat identitas budaya lokal yang menjadi ciri khas daerah.

Pemerintah daerah, lanjutnya, berkomitmen untuk memperkuat sektor tersebut melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), dukungan kebijakan, serta pengembangan sektor pariwisata sebagai penggerak utama ekonomi masyarakat.

"Saya membuka ruang untuk berdiskusi, bertanya, dan menyampaikan gagasan. Pemerintah hadir untuk mendengar dan memfasilitasi," ucapnya.

Secara historis, ekonomi kreatif di Indonesia mulai mendapatkan perhatian serius sejak pembentukan Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) pada 2015, yang kemudian dilebur ke dalam Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Sektor ini bahkan terbukti menjadi salah satu penopang ekonomi nasional, dengan kontribusi signifikan terhadap produk domestik bruto (PDB) serta penyerapan

pan tenaga kerja.

Di tingkat global, ekonomi kreatif juga berkembang pesat seiring transformasi digital. Laporan UNESCO dan UNCTAD mencatat bahwa industri kreatif menjadi salah satu sektor dengan pertumbuhan tercepat di dunia, terutama dalam bidang desain, media digital, dan seni pertunjukan.

Kondisi tersebut, menurut Azhari, menjadi peluang besar bagi daerah untuk mengambil bagian dalam rantai ekonomi global berbasis kreativitas.

"Kalau kita mampu mengelola potensi lokal dengan baik, maka produk kreatif dari Buton Tengah bisa bersaing, tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga internasional," ujarnya.

Dalam kegiatan tersebut, Bupati Azhari didampingi Wakil Bupati Buton Tengah Muh. Adam Basan, Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Armin, Kepala Dinas Pariwisata Samrin Saerani, Ketua TP-PKK Buton Tengah Umi Noranah Azhari, serta Staf Ahli PKK Kartini Adam Basan.

Sementara itu, sesi diskusi yang dipandu oleh Emil menghadirkan sejumlah narasumber, antara lain Asisten

Deputi Pengembangan Amenitas dan Aksesibilitas Pariwisata Wilayah II Kementerian Pariwisata RI Dwi Marhen Yono, Komite Eksekutif ICCN Rafiuddin, Anggota Komisi II DPRD Buton Tengah La Ode Muslimin, CSR Officer Delima International Indonesia Muh. Yunan, Ketua GP Ansor Buton Tengah Sofyan, serta Ketua Buton Tengah Creative Yulisnawati Abbas.

Diskusi berlangsung dinamis dengan berbagai masukan yang diharapkan dapat memperkuat ekosistem ekonomi kreatif di Buton Tengah, sekaligus mendorong lahirnya inovasi baru berbasis potensi lokal.

Kegiatan Camping Kreatif ini juga menjadi simbol tumbuhnya kesadaran kolektif pelaku usaha kreatif untuk membangun jejaring yang berkelanjutan dan berdaya saing tinggi di tengah perubahan ekonomi global.

Dengan dukungan pemerintah dan kolaborasi berbagai pihak, ekonomi kreatif diyakini mampu menjadi pilar strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif di Buton Tengah. (*)

BPMD Busel Rampungkan Administrasi Pengisian Jabatan 15 Kades, Rencana Dilantik 6 Mei 2026

koordinasi lintas perangkat daerah.

Menurut Basri, penunjukan pejabat kepala desa merupakan kewenangan kepala daerah, dalam hal ini Bupati Buton Selatan H Muh Adios, sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

"Ketika terjadi kekosongan jabatan kepala desa definitif, kepala daerah berwenang menunjuk pejabat dari unsur ASN," ujarnya.

Dalam proses penentuan, pemerintah daerah tidak hanya mempertimbangkan aspek administratif, tetapi juga faktor geografis dan kedekatan domisili calon pejabat dengan wilayah tugasnya.

"Kami menguta-

makan ASN yang berasal dari wilayah terdekat, agar lebih memahami kondisi sosial masyarakat dan dapat bekerja lebih efektif," tambahnya.

Ia menjelaskan, masa jabatan pejabat kepala desa bersifat sementara, yakni paling lama 12 bulan atau hingga terpilihnya kepala desa definitif melalui mekanisme yang berlaku.

"Penjabat bisa menjabat maksimal satu tahun atau sampai ada kepala desa definitif, bahkan dapat diganti sesuai keputusan bupati," jelas Basri.

Secara historis, mekanisme penunjukan pejabat kepala desa telah lama menjadi bagian dari sistem

pemerintahan desa di Indonesia, terutama sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengatur tata kelola pemerintahan desa, termasuk pengisian jabatan sementara.

Dalam konteks nasional, praktik penunjukan pejabat sementara juga diterapkan pada berbagai level pemerintahan, seperti penjabat kepala daerah yang ditunjuk saat terjadi kekosongan jabatan akibat berakhirnya masa jabatan atau proses pemilihan.

Secara global, model serupa dikenal dalam sistem pemerintahan lokal di sejumlah negara, di mana pejabat sementara atau caretaker

Pakar Nilai Reshuffle Kabinet Prabowo Akan Rutin demi Stabilitas Politik



Kepala Departemen Politik dan Sosial Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes mengatakan reshuffle kabinet akan sering terjadi dalam beberapa waktu ke depan.

Laporan: Alwan

JAKARTA, BP-Kepala Departemen Politik dan Sosial Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Arya Fernandes, memprediksi reshuffle kabinet pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan terus terjadi dalam beberapa waktu ke depan.

Menurut Arya, langkah pergantian pejabat tersebut lebih banyak didorong oleh kebutuhan politik dibandingkan upaya peningkatan kinerja pemerintahan. Ia menilai reshuffle menjadi instrumen untuk memperkuat dukungan dari partai koalisi maupun relawan.

"Ke depan kita akan melihat reshuffle dilakukan secara berkala, dan umumnya bertujuan memperkuat dukungan politik kepada Presiden," ujar Arya dalam sebuah diskusi di Jakarta, Senin (4/5).

Ia mengungkapkan, hingga saat ini belum terlihat adanya indikasi kuat bahwa reshuffle dilakukan untuk meningkatkan efektivitas

kinerja kabinet. Fenomena ini, kata dia, juga pernah terjadi pada periode pemerintahan sebelumnya.

Arya menilai, reshuffle di Indonesia cenderung lebih sering digunakan sebagai alat kalkulasi politik daripada sebagai langkah evaluasi berbasis kinerja. Oleh karena itu, pergantian pejabat hampir selalu berkaitan dengan dinamika kekuatan politik.

Dalam catatannya, Presiden Prabowo telah melakukan lima kali reshuffle dalam kurun waktu sekitar 1,5 tahun masa pemerintahannya. Total lebih dari 25 pejabat, baik menteri maupun pejabat setingkat lainnya, telah diganti atau ditambahkan.

Arya juga menyoroti komposisi jabatan wakil menteri yang banyak diisi oleh politisi dari partai pendukung pemerintah. Hal ini dinilai berbeda dengan pola pada era Presiden keenam RI, Susilo Bambang Yudhoyono.

Pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yud-

hoyono, jabatan wakil menteri lebih banyak diisi oleh kalangan profesional dan non-partai, sehingga dinilai lebih berorientasi pada kompetensi teknokratis.

Lebih lanjut, Arya menilai frekuensi reshuffle yang cukup tinggi menunjukkan bahwa Presiden masih mencari formulasi ideal dalam menyusun kabinetnya. Padahal, menurut dia, pemerintahan telah berjalan cukup lama untuk menemukan komposisi yang stabil.

Selain itu, ia juga mengindikasikan adanya pengaruh faksi-faksi politik di sekitar Presiden yang turut memengaruhi keputusan reshuffle. Gejala tersebut dinilai semakin terlihat dalam beberapa waktu terakhir.

Di sisi lain, Arya mengingatkan bahwa Presiden juga menghadapi tantangan dalam menjaga tingkat kepuasan publik atau approval rating. Faktor ini dinilai sangat penting dalam menjaga soliditas koalisi pemerintahan.

Menurutnya, tingkat elektabilitas dan kepuasan publik terhadap Presiden akan memengaruhi sikap partai-partai politik dalam menentukan posisi mereka menjelang pemilihan umum.

"Partai bisa saja menarik dukungan jika tingkat kepuasan dan elektabilitas mengalami penurunan," kata Arya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan reshuffle kabinet pada 27 April lalu. Dalam perombakan tersebut, enam pejabat baru dilantik di lingkungan kementerian dan lembaga.

Sejumlah pejabat yang dilantik merupakan figur lama yang mendapakan penugasan baru, sementara lainnya merupakan sosok baru yang masuk dalam jajaran pemerintahan.

Pelantikan tersebut digelar di Istana Kepresidenan Jakarta dan dihadiri oleh sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, menandai reshuffle kelima sejak pemerintahan Prabowo berjalan. (*)

Prabowo Setujui Kompolnas Diperkuat, Rekomendasi Kini Mengikat Reformasi Polri: Kompolnas Diperluas, Keputusan Wajib Dijalankan



Laporan: Radit

JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto menyetujui penguatan kewenangan Komisi Kepolisian Republik Indonesia (Kompolnas) dengan menjadikan setiap rekomendasinya bersifat mengikat bagi institusi kepolisian.

Kesepakatan tersebut dicapai dalam pertemuan bersama Komite Percepatan Reformasi Polri di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa (5/5), sebagai bagian dari upaya mempercepat reformasi kelembagaan Polri.

Langkah ini menandai perubahan signifikan dalam sistem pengawasan eksternal kepolisian, di mana Kompolnas ke depan tidak hanya memberikan rekomendasi, tetapi juga memiliki kekuatan hukum yang wajib dilaksanakan oleh Kapolri.

Ketua Komite Percepatan Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie, mengatakan bahwa Presiden memberikan dukungan penuh terhadap penguatan tersebut.

"Bapak Presiden sangat menyetujui untuk dilakukannya penguatan Kompolnas, sehingga keputusan dan rekomendasinya mengikat," ujar Jimly di kompleks Istana Kepresidenan.

Selain itu, Jimly menyebutkan bahwa komposisi keanggotaan Kom-

polnas akan diubah dengan menghapus unsur ex-officio guna memperkuat independensi lembaga tersebut.

Menurut dia, perubahan tersebut diyakini akan membuat fungsi pengawasan terhadap Polri menjadi lebih efektif dan profesional.

Dalam waktu dekat, pemerintah juga akan mengajukan rancangan undang-undang terkait penguatan Kompolnas ke DPR untuk dibahas sebagai bagian dari amandemen Undang-Undang Kepolisian.

Anggota Komite Percepatan Reformasi Polri, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa kewenangan Kompolnas akan diperluas secara signifikan dalam regulasi baru tersebut.

"Keputusan Kompolnas itu bersifat mengikat, sehingga Kapolri harus melaksanakannya," kata Yusril.

Ia menambahkan bahwa penyusunan draf perubahan undang-undang akan melibatkan berbagai kementerian, termasuk Kementerian Hukum dan HAM yang dipimpin oleh Supratman Andi Agtas.

Proses legislasi tersebut ditargetkan berjalan paralel dengan penyesuaian regulasi internal Polri, yang mencakup revisi terhadap delapan Peraturan Polri dan 24 Peraturan Kapolri.

Jimly menyatakan bahwa seluruh penyesuaian regulasi itu ditargetkan rampung secara bertahap hingga tahun 2029 sebagai bagian dari agenda reformasi jangka menengah.

Secara historis, Kompolnas dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011 sebagai lembaga pengawasan eksternal Polri, namun selama ini rekomendasinya belum bersifat mengikat.

Di tingkat internasional, sejumlah negara telah lebih dulu menerapkan model pengawasan kepolisian yang kuat, seperti Independent Office for Police Conduct di Inggris dan Civilian Review Boards di Amerika Serikat, yang memiliki kewenangan lebih tegas dalam mengawasi aparat penegak hukum.

Penguatan Kompolnas ini dinilai sebagai langkah strategis untuk meningkatkan akuntabilitas kepolisian di Indonesia, sekaligus menjawab tuntutan publik terhadap transparansi dan profesionalisme aparat.

Dengan perubahan tersebut, pemerintah berharap kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian dapat meningkat, seiring dengan implementasi reformasi yang lebih menyeluruh dan berkelanjutan. (*)

Musrenbang Sultra: Gubernur ASR Dorong Sinergi untuk Kurangi Ketimpangan



Laporan: Mashuri

SULTRA, BP- Gubernur Sultra Andi Sumangerukka menegaskan bahwa kolaborasi lintas pemerintahan menjadi kunci utama dalam arah pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2027. Pernyataan itu disampaikan saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat provinsi di Kolaka, Selasa (5/5/2026).

Dalam forum tersebut, gubernur menyoroti tantangan fiskal yang dihadapi daerah, terutama tingginya ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat serta besarnya porsi belanja operasional. Kondisi itu dinilai berpotensi menghambat optimalisasi pelayanan publik jika tidak dikelola secara efektif.

"Pengelolaan anggaran harus lebih efisien dan terarah. Belanja pemerintah, khususnya belanja operasional, harus memberikan dampak langsung bagi masyarakat," ujar Andi Sumangerukka.

Ia menambahkan, beban pemeliharaan aset daerah yang terus meningkat juga menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga keberlanjutan pembangunan.

Dari sisi kinerja ekonomi, Sulawesi Tenggara mencatat pertumbuhan sebesar 5,70 persen pada 2025, meningkat dibandingkan 5,40 persen pada 2024 dan melampaui rata-rata nasional se-

besar 5,11 persen. Tren ini menunjukkan adanya ketahanan ekonomi daerah di tengah dinamika global.

Namun demikian, angka kemiskinan masih berada pada level 10,14 persen, lebih tinggi dari rata-rata nasional sebesar 8,26 persen. Hal ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan ke depan.

Selain itu, indikator makro lainnya menunjukkan perbaikan. Gini Ratio pada September 2025 tercatat 0,357, membaik dari 0,363 pada Maret 2025. Tingkat pengangguran terbuka pada Februari 2026 juga berada di angka 3,33 persen, relatif rendah secara nasional.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulawesi Tenggara pada 2025 mencapai 74,25, meningkat dari 73,62 pada 2024, sekaligus menempatkan provinsi ini dalam kategori tinggi.

Meski sejumlah indikator menunjukkan tren positif, gubernur menekankan masih adanya ketimpangan pembangunan antara wilayah kepulauan dan daratan. Ia menilai perbedaan akses infrastruktur dan layanan dasar menjadi penyebab utama kesenjangan tersebut.

"Pembangunan

tidak boleh lagi berjalan sendiri-sendiri. Kita harus memastikan ada konektivitas dan pemerataan antara wilayah kepulauan dan daratan," katanya.

Untuk wilayah kepulauan, pemerintah memprioritaskan pembangunan infrastruktur dasar dan peningkatan konektivitas. Sementara wilayah daratan difokuskan pada penguatan ekonomi kerakyatan berbasis koperasi dan UMKM.

Gubernur juga mendorong penguatan Koperasi Merah Putih sebagai penghubung antara pelaku usaha kecil dengan kawasan industri. Menurutnya, model ini dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal secara inklusif.

Dalam konteks perencanaan, ia menegaskan bahwa pendekatan sektoral harus ditinggalkan. Integrasi program lintas level pemerintahan dinilai penting agar pembangunan lebih efektif dan tidak tumpang tindih.

"Kita butuh perencanaan yang terintegrasi, dari pusat hingga daerah. Kolaborasi adalah kunci agar program tepat sasaran," ujarnya.

Secara historis, pendekatan kolaboratif dalam pembangunan telah menjadi tren global sejak diperkenalkannya konsep United Na-

tions melalui agenda Sustainable Development Goals pada 2015. Pendekatan ini menekankan pentingnya kemitraan antaraktor dalam mencapai pembangunan berkelanjutan.

Di tingkat nasional, model perencanaan partisipatif melalui Musrenbang telah diterapkan sejak era reformasi, seiring diberlakukannya desentralisasi melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pengalaman sejumlah negara seperti Korea Selatan dan Vietnam juga menunjukkan bahwa sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi faktor penting dalam mendorong percepatan pembangunan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.

Dengan berbagai tantangan dan peluang tersebut, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara berharap Musrenbang 2027 mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang lebih inklusif, terukur, dan berkelanjutan.

"Kolaborasi bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan dalam menghadapi kompleksitas pembangunan saat ini," kata gubernur menegaskan. (*)

Bupati Buton Alvin Akawijaya Raih Top Pembina BUMD 2026, Dorong Ekonomi Daerah



Laporan: La Harman

BUTON, BP- Ajang Top BUMD Awards 2026 yang diikuti lebih dari 1.170 badan usaha milik daerah (BUMD) dari seluruh Indonesia kembali menegaskan pentingnya peran kepala daerah dalam mendorong kinerja perusahaan daerah. Dalam ajang tersebut, Bupati Buton, Alvin Akawijaya Putra, berhasil meraih penghargaan sebagai Top Pembina BUMD 2026.

Penghargaan itu menjadi bentuk pengakuan atas kontribusi nyata dalam memperkuat tata kelola dan kinerja BUMD di Kabupaten Buton, sekaligus menegaskan posisi BUMD sebagai salah satu instrumen strategis pembangunan ekonomi daerah.

Penyerahan penghargaan dilakukan di ruang kerja Bupati Buton pada Rabu, 29 April 2026, oleh Direktur Utama BPR Bahteramas Buton, Dasnur, bersama Direktur Operasional PT BPR Bahteramas Buton (Perseroda), Anwar Sadat.

Ajang penghargaan ini diselenggarakan oleh Majalah Top Business bekerja sama dengan Institut Otonomi Daerah serta sejumlah lembaga independen lainnya yang berfokus pada peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah.

Dalam keterangannya, pihak manajemen PT BPR Bahteramas Buton (Perseroda) menilai kepemimpinan Bupati Buton telah memberikan arah kebijakan yang jelas dan konsisten dalam penguatan BUMD.

"Penghargaan ini tidak terlepas dari komitmen dan dukungan strategis Bupati sebagai pembina

BUMD yang mampu mendorong kinerja perusahaan daerah secara profesional," ujar perwakilan manajemen.

Ia menambahkan, pendekatan kepemimpinan yang adaptif dan berbasis tata kelola yang baik menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas dan pertumbuhan BUMD di daerah.

Sementara itu, Alvin Akawijaya Putra menyampaikan bahwa penghargaan tersebut merupakan hasil kerja bersama antara pemerintah daerah dan seluruh jajaran BUMD.

"Ini bukan hanya capaian pemerintah daerah, tetapi hasil kolaborasi yang kuat antara pemegang saham dan manajemen BUMD," katanya.

Ia juga menegaskan bahwa BUMD harus terus bertransformasi untuk menghadapi tantangan sektor ekonomi dan keuangan yang semakin dinamis.

"Kami akan terus mendorong inovasi, memperkuat layanan, serta memastikan kontribusi nyata bagi masyarakat," tambahnya.

Secara historis, penguatan BUMD di Indonesia mulai mendapatkan perhatian serius sejak era otonomi daerah pasca reformasi, terutama setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam konteks global, perusahaan milik pemerintah daerah atau municipal enterprises telah lama menjadi instrumen penting pembangunan ekonomi, seperti di Jerman dan

Jepang yang sukses memanfaatkan perusahaan publik untuk meningkatkan layanan publik dan stabilitas ekonomi lokal.

Keberhasilan sejumlah negara tersebut menunjukkan bahwa tata kelola yang baik, transparansi, dan inovasi menjadi kunci utama dalam menjadikan perusahaan daerah sebagai penggerak ekonomi yang efektif.

Di Kabupaten Buton, sinergi antara pemerintah daerah dan BUMD dinilai telah berjalan dengan baik, sehingga mampu menjaga kinerja perusahaan tetap stabil sekaligus meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah.

Penghargaan ini juga mencerminkan keberhasilan strategi pembangunan ekonomi daerah yang menempatkan BUMD sebagai salah satu pilar utama dalam mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.

Ke depan, Pemerintah Kabupaten Buton diharapkan terus memperkuat transformasi BUMD melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, digitalisasi layanan, serta perluasan akses pasar.

Dengan demikian, peran BUMD tidak hanya sebagai entitas bisnis, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas. (*)

Pemkab Buton - Kejari Perkuat Sinergi Hukum untuk Tata Kelola Bersih



Pewartanya: La Harman

BUTON, BP- Pemerintah Kabupaten Buton menandatangani kesepakatan bersama dengan Kejaksaan Negeri Buton terkait penanganan permasalahan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara. Langkah ini diambil sebagai upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, dan akuntabel.

Penandatanganan berlangsung di Aula Bupati Buton, Kompleks Perkantoran Takawa, Rabu, dan dihadiri oleh jajaran pemerintah daerah serta unsur Kejaksaan Negeri Buton. Kesepakatan tersebut mencakup pemberian bantuan hukum, pendampingan, pertimbangan hukum, hingga tindakan hukum lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bupati Buton, Alvin Akawijaya Putra, SH, menegaskan bahwa kerja sama ini menjadi instrumen penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang taat hukum. Ia menilai, kompleksitas kebijakan publik membutuhkan penguatan

aspek legal agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

"Kesepakatan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, dan akuntabel," ujar Alvin dalam sambutannya.

Ia menambahkan, seluruh perangkat daerah perlu memahami batasan hukum dalam menjalankan tugas. Menurutnya, kesalahan administratif yang tidak disadari kerap menjadi pintu masuk persoalan hukum yang lebih besar.

"Kepada seluruh jajaran pemerintah daerah agar diberikan pemahaman untuk bekerja dengan baik dan tidak melakukan pelanggaran dalam menjalankan tugas," kata Alvin.

Kerja sama ini juga diarahkan sebagai langkah preventif untuk meminimalkan potensi sengketa hukum, baik yang berkaitan dengan kebijakan publik maupun administrasi pemerintahan. Dengan adanya pendampingan dari Kejaksaan, setiap kebijakan diharapkan lebih terukur dari sisi

hukum.

Dari sisi Kejaksaan Negeri Buton, dukungan terhadap pemerintah daerah merupakan bagian dari fungsi jaksa sebagai pengacara negara. Peran ini tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif melalui pemberian pertimbangan hukum sejak tahap perencanaan kebijakan.

Model kolaborasi semacam ini bukan hal baru dalam praktik pemerintahan di Indonesia. Sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, jaksa memiliki kewenangan memberikan bantuan hukum kepada instansi pemerintah dalam perkara perdata dan tata usaha negara.

Secara historis, pendekatan pendampingan hukum oleh jaksa juga sejalan dengan praktik di sejumlah negara, seperti Belanda dan Prancis, di mana lembaga kejaksaan berperan sebagai penasihat hukum negara dalam menjaga kepatuhan administrasi publik terhadap hukum.

Di Indonesia, kerja sama antara pemerintah daerah dan kejaksaan semakin intensif

dalam satu dekade terakhir, terutama untuk mencegah tindak pidana korupsi serta meningkatkan kualitas pengambilan keputusan berbasis hukum.

Bupati Alvin menekankan bahwa kesepakatan ini harus menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan.

"Kerja sama ini diharapkan menjadi penguatan agar setiap program tetap berpedoman pada aturan yang berlaku," ujarnya.

Dengan adanya kesepakatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Buton optimistis penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dapat berjalan lebih tertib, aman, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Sinergi antara Pemkab Buton dan Kejaksaan Negeri Buton ini diharapkan menjadi fondasi penting dalam menciptakan birokrasi yang transparan serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. (*)

Buton Tengah Pacu Pariwisata Jadi Motor Utama Ekonomi Daerah



Laporan: Ardi

BUTON TENGAH, BP- Pemerintah Kabupaten Buton Tengah menargetkan sektor pariwisata sebagai penggerak utama ekonomi daerah pada 2026 melalui langkah percepatan yang terukur dan berbasis potensi lokal. Komitmen tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Perencanaan Pengembangan Ekonomi Pariwisata yang dipimpin langsung Bupati Buton Tengah, Dr. Azhari.

Rapat yang berlangsung di Aula Pancana, Kantor Bupati Bumi Praja Labungkari, Sabtu (2/5/2026), menjadi forum strategis untuk menyatukan arah kebijakan lintas sektor. Kegiatan ini digelar usai peringatan Hari Pendidikan Nasional dan dihadiri Wakil Bupati Muh. Adam Basan, pimpinan DPRD, kepala OPD, camat, serta kepala desa.

Dalam pemaparannya, narasumber dari Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, Dwi Marhen Yono, menekankan pentingnya pendekatan kolaboratif dalam pengembangan destinasi wisata. Ia mencontohkan keberhasilan Kabupaten Banyuwangi yang mampu mentransformasi daerahnya melalui inovasi event, aksesibilitas, dan promosi digital.

"Pengembangan pariwisata membutuhkan perencanaan matang, sinergi lintas sektor, serta kreativitas dalam mengemas

potensi lokal menjadi produk yang bernilai jual tinggi," ujarnya.

Sejalan dengan itu, Bupati Azhari menegaskan bahwa paradigma pembangunan harus bergeser dari sekadar proyek fisik menjadi pembangunan berbasis manfaat nyata bagi masyarakat. Ia meminta seluruh perangkat daerah bekerja cepat dan terarah.

"Saya minta seluruh kepala OPD tidak hanya berpikir soal proyek, tetapi bagaimana menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. Kita harus bergerak cepat," tegas Azhari.

Ia juga menyoroti pentingnya pemetaan potensi wisata secara komprehensif, mulai dari rumah adat, bentang alam pantai, gua, hingga kekayaan kuliner khas daerah yang selama ini belum tergarap maksimal.

Menurutnya, pengembangan harus dilakukan secara bertahap dan berbasis data riil. Pemerintah daerah akan melakukan pemantauan berkala untuk memastikan setiap program berjalan sesuai target yang telah ditetapkan.

"Semua potensi harus dipetakan dan dikembangkan satu per satu. Saya akan terus memantau progresnya," ujarnya.

Bupati juga mendorong aparat sipil negara menghadirkan inovasi dan gagasan segar dalam mendukung percepatan sektor pariwisata. Ia menegaskan evaluasi akan dilakukan jika target tidak tercapai.

"Jika tidak me-

enuhi target, tentu akan ada evaluasi. Kita butuh orang-orang yang mampu membawa Buton Tengah maju," katanya.

Secara historis, pengembangan pariwisata telah menjadi strategi nasional sejak era 1990-an, ketika pemerintah mulai mendorong sektor ini sebagai sumber devisa nonmigas. Program seperti 'Visit Indonesia Year' yang diluncurkan pada 1991 menjadi tonggak awal promosi wisata nasional di kancah global.

Dalam perkembangan global, sektor pariwisata juga terbukti menjadi salah satu penyumbang ekonomi terbesar dunia sebelum pandemi Covid-19, dengan kontribusi signifikan terhadap produk domestik bruto di banyak negara. Transformasi digital dan promosi berbasis pengalaman kini menjadi tren utama dalam menarik wisatawan internasional.

Di tingkat daerah, sejumlah wilayah di Indonesia seperti Banyuwangi dan Labuan Bajo menunjukkan bahwa pengelolaan pariwisata yang terintegrasi mampu meningkatkan pendapatan daerah sekaligus membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat.

Melalui rakor ini, Pemerintah Kabupaten Buton Tengah berharap dapat merumuskan langkah konkret dan berkelanjutan. Pariwisata diharapkan tidak hanya menjadi sektor pelengkap, melainkan fondasi utama dalam memperkuat ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas. (*)

Konsorsium 1.000 HPK Diluncurkan, Strategi Baru Selamatkan Generasi

Pemerintah Tegaskan Akses Kesehatan Setara bagi Seluruh Perempuan



JAKARTA- Pemerintah memperkuat strategi pembangunan kesehatan nasional dengan meluncurkan Konsorsium 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) guna memastikan setiap anak Indonesia memperoleh layanan kesehatan dan gizi optimal sejak dalam kandungan hingga usia dua tahun.

Langkah ini dinilai krusial mengingat kualitas sumber daya manusia sangat ditentukan pada periode emas 1.000 hari pertama kehidupan, yang berpengaruh langsung terhadap kesiapan Indonesia menghadapi momentum satu abad kemerdekaan pada 2045.

Kementerian Kesehatan mencatat, sebanyak 84 juta anak Indonesia saat ini akan menjadi generasi produktif pada masa tersebut, sehingga intervensi sejak dini menjadi prioritas utama pemerintah.

Dalam peluncuran di Kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa upaya peningkatan kualitas kesehatan ibu dan anak tidak boleh dilakukan secara biasa.

"Target saya, kematian ibu harus turun dari sekitar 4.000 kasus per tahun menjadi di bawah 400. Begitu

juga kematian bayi dari 30.000 menjadi di bawah 3.000 kasus," ujar Budi.

Ia menambahkan bahwa pemerintah juga menargetkan penurunan prevalensi stunting hingga di bawah 7 persen dalam beberapa tahun ke depan sebagai bagian dari indikator keberhasilan program.

"Ini bukan sekadar angka, ini menyangkut masa depan bangsa. Kita tidak bisa bekerja biasa-biasa saja," kata Budi menegaskan.

Untuk mencapai target tersebut, pemerintah menyiapkan pendekatan berbasis data dengan fokus pada pencegahan risiko kehamilan dan persalinan, termasuk penanganan preeklamsia pada ibu hamil serta sepsis pada bayi baru lahir.

Berbagai langkah konkret telah disiapkan, antara lain kewajiban pemeriksaan kehamilan minimal delapan kali serta distribusi 10.000 alat USG ke seluruh Puskesmas guna meningkatkan deteksi dini.

Selain itu, pemerintah tengah merancang produksi dalam negeri untuk suplemen multivitamin dan mineral (MMS) guna memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil secara berkelanjutan.

Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas, Maria Endang Sumiwi, menyebutkan bah-

wa Indonesia telah menunjukkan kemajuan dalam penanganan stunting.

"Indikator capaian kita meningkat dari tiga pada 2024 menjadi delapan pada 2025. Ini menunjukkan arah yang positif," ujarnya.

Ia menekankan bahwa keberhasilan program tidak hanya diukur dari penurunan angka kematian, tetapi juga dari kualitas tumbuh kembang anak melalui pemantauan gizi dan stimulasi yang tepat.

Konsorsium 1.000 HPK dibentuk untuk mengintegrasikan berbagai inisiatif yang selama ini berjalan sendiri-sendiri, dengan melibatkan pemerintah, swasta, akademisi, dan organisasi masyarakat.

Empat kelompok kerja dalam konsorsium akan memantau setiap fase penting, mulai dari prakonsepsi hingga anak berusia dua tahun, guna memastikan intervensi berjalan efektif dan terkoordinasi.

Dalam implementasinya, Kementerian Kesehatan menunjuk Rabu Biru Foundation sebagai sekretariat konsorsium untuk memperkuat koordinasi lintas sektor.

Direktur Eksekutif Rabu Biru Foundation, Toro Sudarmadi, menyatakan kesiapan pihaknya dalam mendukung sinergi program.

"Kami akan me-

mastikan setiap inisiatif mitra dapat terukur dampaknya dan langsung dirasakan masyarakat," kata Toro.

Secara historis, upaya penurunan stunting dan kematian ibu di Indonesia telah menunjukkan tren perbaikan dalam satu dekade terakhir. Data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) mencatat prevalensi stunting turun dari sekitar 37 persen pada 2013 menjadi sekitar 21 persen pada 2022.

Di tingkat global, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) juga menekankan pentingnya intervensi pada 1.000 hari pertama kehidupan sebagai kunci menurunkan kematian anak dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Meski demikian, Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam pemerataan layanan kesehatan, terutama di wilayah terpencil dan kepulauan.

Melalui Konsorsium 1.000 HPK, pemerintah berharap setiap bayi yang lahir, termasuk di pelosok desa, mendapatkan layanan kesehatan dan asupan gizi yang layak sejak hari pertama kehidupannya.

Program ini sekaligus menjadi bagian dari strategi besar pembangunan manusia Indonesia yang berkelanjutan dan berdaya saing global. (*)

JAKARTA- Pemerintah Indonesia menegaskan komitmen untuk mewujudkan kesetaraan akses layanan kesehatan bagi perempuan melalui Forum Nasional Kesehatan Perempuan yang digelar di Auditorium dr. J. Leimena, Kementerian Kesehatan RI, Jakarta, Rabu (29/4/2026).

Forum bertema 'No Woman Left Behind: Akses Setara, Layanan Unggul, Masa Depan Tangguh' ini menjadi ruang strategis lintas kementerian dan lembaga untuk memperkuat sistem layanan kesehatan yang inklusif bagi perempuan di seluruh Indonesia.

Secara historis, isu kesehatan perempuan telah menjadi perhatian global sejak Deklarasi Beijing 1995 yang menegaskan hak perempuan atas kesehatan reproduksi. Di Indonesia, upaya serupa diperkuat melalui transformasi sistem kesehatan nasional serta pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) poin ketiga, yakni kehidupan sehat dan sejahtera.

Di tingkat global, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) juga menempatkan kesehatan perempuan sebagai indikator utama pembangunan manusia, terutama dalam menurunkan angka kematian ibu yang masih menjadi tantangan di berbagai negara berkembang.

Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin, dalam forum tersebut menegaskan bahwa tantangan utama kesehatan saat ini bukan hanya memperpanjang usia harapan hidup, tetapi memastikan masyarakat tetap sehat hingga usia lanjut.

"Rata-rata usia hidup sudah mencapai 74 tahun, tetapi banyak yang mulai mengalami penyakit pada usia 60-an. Fokus kita adalah memperpanjang masa hidup sehat, bukan sekadar umur panjang," ujar Budi.

Ia menjelaskan bahwa pemerintah mendorong deteksi dini melalui pemeriksaan rutin tiga indikator utama, yakni tekanan darah, gula darah, dan kadar lemak darah, yang menjadi faktor risiko utama penyakit kronis.

"Kalau tiga indikator ini dijaga sejak dini, risiko penyakit seperti stroke, jantung, dan gagal ginjal bisa ditekan secara signifikan," tambahnya.

Lebih lanjut, Budi menekankan bahwa perempuan memiliki peran sentral dalam sistem kesehatan keluarga. Menurutnya, ibu adalah aktor utama dalam membentuk pola hidup sehat di rumah tangga.

"Ibu-ibu adalah tenaga kesehatan alami di rumah. Jika dibekali pengetahuan yang tepat, dampaknya sangat besar bagi kesehatan keluarga," katanya.

Sementara itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifah Fauzi, menegaskan bahwa kesehatan perempuan merupakan hak dasar yang wajib dipenuhi negara sebagai bagian dari pembangunan nasional.

"Perempuan bukan sekadar kelompok rentan, tetapi aktor utama pembangunan. Perempuan yang sehat akan melahirkan generasi yang sehat," ujar Arifah.

Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka, turut menyoroti pentingnya penguatan layanan kesehatan reproduksi dalam menurunkan angka kematian ibu dan bayi di Indonesia.

"Perempuan yang sehat secara fisik dan mental akan melahirkan generasi yang sehat dan berkualitas," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa layanan keluarga berencana, termasuk kontrasepsi

pascapersalinan, menjadi salah satu intervensi penting dalam meningkatkan kualitas keluarga di Indonesia.

Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan, Prof. Asnawi Abdullah, menyampaikan bahwa forum ini dirancang sebagai ruang partisipatif dalam perumusan kebijakan kesehatan perempuan yang lebih inklusif dan berbasis kebutuhan lapangan.

"Forum ini memastikan suara perempuan benar-benar menjadi bagian dalam penyusunan kebijakan kesehatan nasional," katanya.

Secara nasional, Indonesia masih menghadapi tantangan angka kematian ibu yang pada beberapa dekade lalu tergolong tinggi di kawasan Asia Tenggara. Namun, berbagai intervensi kesehatan telah menurunkan angka tersebut secara bertahap dalam dua dekade terakhir.

Dalam konteks global, upaya penurunan kematian ibu juga menjadi agenda utama WHO dan Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui program Global Strategy for Women, Children and Adolescents Health yang menargetkan peningkatan akses layanan kesehatan esensial.

Melalui forum ini, pemerintah menegaskan kembali komitmen No Woman Left Behind sebagai upaya memastikan tidak ada perempuan Indonesia yang tertinggal dalam memperoleh layanan kesehatan berkualitas, termasuk melalui optimalisasi Program Cek Kesehatan Gratis (CKG).

Pendekatan ini diharapkan dapat memperkuat sistem kesehatan nasional sekaligus meningkatkan kualitas hidup perempuan sebagai fondasi utama pembangunan generasi masa depan yang sehat dan tangguh. (*)

<p>PT FAREN GRAFIKA</p> <p>Harian Pagi Baubau Post</p> <p>KRITIK, LUGAS, DAN INDEPENDEN</p> <p>Wartawan Baubau Post tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun dalam melakukan tugas jurnalistik</p> <p>Dalam Pelaksanaan Tugas, Wartawan Baubau Post dibekali tanda pengenal. Untuk itu, masyarakat yang mencurigai seseorang yang mengatasnamakan Baubau Post, segera menghubungi Kantor Redaksi Surat Kabar Baubau Post</p> <p>Segala berita yang diterbitkan oleh Baubau Post meruakan tanggung jawab penanggungjawab redaksi</p>	<p>Pemimpin Umum: Fauzan NWA Penanggungjawab/Pemimpin Redaksi: Ardi Redpel: Prasetyo Korlip: Firman Redaktur: Kasrun, Rahim Reporter: Mashuri, Lisna, Asis, Hafid, Amat Jr, Noval, La Harman</p>	<p>Layouter: Ririn Pracetak: Aditya Cetak: Jamaludin</p>	<p>Penerbit: PT FAREN GRAFIKA Komisaris: Erna Agule Direktur Utama: Andina Latief Manager Keuangan: Nabila DAA Manager Iklan & Pemasaran: Jamaluddin Kepala Sirkulasi: Robi Administrasi: Salvana</p>	<p>Kepala Biro Wakatobi: Risman Kepala Biro Buton Utara: Kasrun Kepala Biro Buton: La Harman Kepala Biro Buton Selatan: Firman Kepala Biro Buton Tengah: Komarudin Kepala Biro Sultra: Masuri</p> <p>Agen Baubau: Jamaluddin Agen Buton Selatan: Firman Agen Buton: Samrihan Agen Buton Utara: Kasrun</p> <p>Harga dan Langganan: Dalam Kota Baubau 100.000/bulan, Luar Kota Baubau + Ongkos Kirim Eceran dalam Kota Baubau Rp 5000/eks</p>
<p>Alamat Redaksi/Tata usaha: Jalan Raya Palagimata (BTN Lipu Morikana) Blok K Nomor 01 Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara Tlp 0402-2014287- Email: baubaupost2019@gmail.com, ardiandina7786@gmail.com</p> <p>Percetakan: PT Faren Grafika, Alamat: Jalan Raya Palagimata (BTN Lipu Morikana) Blok K Nomor 01 Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara</p>				

Gugatan Ijazah Joko Widodo Berlanjut di PN Solo, Alumni Universitas Gadjah Mada Jadi Penggugat



Ilustrasi ijazah Jokowi

Laporan: Amran

JAKARTA, BP- Gugatan terkait ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali mencuat ke ranah hukum setelah seorang alumnus Universitas Gadjah Mada mengajukan perkara perdata di Pengadilan Negeri (PN) Solo. Perkara ini menjadi sorotan publik karena menyentuh aspek legitimasi administratif seorang kepala negara, meskipun fokus gugatan tidak secara langsung mempersoalkan keaslian dokumen tersebut.

Sidang perdana gugatan dengan nomor perkara 101/Pdt.G/2026/PN Skt telah digelar pada Selasa (5/5) di PN Solo, Jawa Tengah. Agenda awal persidangan adalah pemanggilan para pihak, yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Bayu Soho Rahardjo bersama dua hakim anggota, Dian Erdianto dan Ledis Meriana Bakara.

Dalam sidang tersebut, para pihak prinsipal, termasuk pihak tergugat dan penggugat, tidak hadir secara langsung dan diwakili oleh kuasa hukum masing-masing. Sementara itu, Polda Metro Jaya sebagai turut tergugat II tidak menghadiri sidang tanpa

keterangan resmi.

Majelis hakim memutuskan untuk menjadwalkan pemanggilan ulang terhadap turut tergugat II guna memastikan kelengkapan kehadiran seluruh pihak dalam proses persidangan berikutnya. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga prinsip fair trial dalam perkara perdata.

Penggugat dalam kasus ini adalah Sigrit Pratomo, seorang pengacara asal Klaten, Jawa Tengah, yang juga merupakan alumnus Fakultas Hukum UGM. Ia mengajukan gugatan terhadap Jokowi dengan dalil perbuatan melawan hukum.

Dalam argumentasinya, penggugat menilai Jokowi tidak pernah hadir dalam persidangan sebelumnya serta tidak menunjukkan ijazah aslinya, baik di ruang publik maupun dalam forum hukum. Hal ini menjadi dasar gugatan yang diajukan ke PN Solo.

Kuasa hukum penggugat, Dekka Ajeng Maharasri, menegaskan bahwa gugatan tersebut tidak berupaya membuktikan keaslian ijazah. Ia menyebut tujuan utama adalah menghadirkan Jokowi dalam persidangan dan menunjukkan dokumen yang dimaksud.

Prinsipnya,

kami tidak menyatakan ijazah itu asli atau tidak. Kami hanya ingin yang bersangkutan hadir dan menunjukkan ijazahnya di persidangan," ujar Dekka dalam keterangannya kepada media.

Di sisi lain, kuasa hukum Jokowi, YB Irgan, menilai gugatan tersebut tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Ia berpendapat tidak ada kewajiban hukum yang mengharuskan kliennya menunjukkan ijazah kepada publik atau dalam persidangan tanpa perintah pengadilan.

"Tidak ada putusan atau perintah pengadilan yang mewajibkan hal tersebut, sehingga tidak tepat jika dianggap sebagai perbuatan melawan hukum," kata Irgan.

Meski demikian, pihak Jokowi menyatakan tetap menghormati proses hukum yang berjalan. Irgan juga menilai substansi gugatan disampaikan secara santun dan tidak menyerang kehormatan pribadi kliennya.

"Formulasi gugatan ini cukup santun dan tidak mengandung unsur yang menyerang kehormatan pribadi," ujarnya.

Secara historis, polemik terkait ijazah pejabat publik bukanlah hal baru di

Indonesia. Dalam beberapa kasus sebelumnya, isu serupa pernah mencuat terhadap sejumlah kepala daerah dan pejabat negara, yang umumnya diselesaikan melalui verifikasi lembaga pendidikan atau putusan pengadilan.

Di tingkat internasional, kontroversi mengenai latar belakang pendidikan pemimpin juga pernah terjadi, seperti kasus dugaan pemalsuan ijazah di beberapa negara berkembang, yang berujung pada investigasi resmi dan bahkan pengunduran diri pejabat terkait.

Dalam konteks Indonesia, Universitas Gadjah Mada sebagai institusi pendidikan yang disebut dalam perkara ini memiliki rekam jejak panjang sebagai salah satu perguruan tinggi terkemuka, sehingga keterlibatannya sebagai turut tergugat menjadi perhatian tersendiri.

Perkara ini diperkirakan akan terus bergulir dengan agenda sidang lanjutan yang akan memanggil kembali seluruh pihak terkait. Publik kini menanti bagaimana proses hukum ini akan berkembang dan memberikan kepastian terhadap isu yang kembali mencuat tersebut. (*)

Polisi Tangkap Dua Pelaku Pemukulan Waketum PSI di Menteng



Ilustrasi pemukulan

Laporan: Hadi

JAKARTA, BP- Kepolisian mengamankan dua terduga pelaku pemukulan terhadap Wakil Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Ronald Sinaga, setelah insiden kekerasan yang terjadi di kawasan Menteng, Senin (4/5). Peristiwa tersebut menyebabkan korban mengalami luka di bagian kepala dan telah dilaporkan secara resmi ke pihak berwajib.

Kapolsek Metro Menteng, Braiel Arnold Rondonuwu, menyatakan bahwa korban telah menjalani visum dan sejumlah saksi sudah dimintai keterangan guna mendalami peristiwa tersebut. "Terduga pelaku sebanyak dua orang sudah kami amankan di Polsek untuk diproses lebih lanjut," ujarnya kepada wartawan.

Peristiwa pemukulan ini terjadi saat Ronald mendampingi seorang kolega dalam pertemuan dengan pimpinan firma hukum Michael Putra and Partners (MPP). Pertemuan tersebut berkaitan dengan penggelapan dana perusahaan PT SKS senilai Rp9 miliar yang belum mendapatkan kejelasan.

Menurut Ronald, persoalan bermula dari tuntutan karyawan terkait gaji dan dana perusahaan yang disebut hilang tanpa penjelasan. Ia menegaskan bahwa dana tersebut sebelumnya berada dalam pengelolaan pihak firma hukum.

Sebelum insiden terjadi, sejumlah karyawan sempat menggelar aksi di kantor firma tersebut. Situasi mulai memanas ketika tiga orang yang mengaku sebagai petugas keamanan meminta mereka meninggalkan lokasi sekitar

pukul 18.00 WIB.

Ketegangan meningkat menjadi cecok antara kedua belah pihak. Aparat dari Polsek Menteng yang lebih dulu tiba di lokasi sempat meredakan situasi dan memukul mundur pihak yang terlibat.

Namun, kondisi kembali memanas sekitar 15 menit kemudian saat tiga orang tersebut kembali ke lokasi di lantai empat gedung. Dalam waktu singkat, cecok kembali terjadi dan berujung pada aksi pemukulan terhadap Ronald.

"Cecok singkat sebelum akhirnya terjadi pemukulan seperti yang terlihat dalam video," kata Ronald menjelaskan kronologi kejadian.

Rekaman video insiden tersebut kemudian beredar luas di media sosial dan menarik perhatian publik. Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, turut mengunggah video itu dan mendesak aparat penegak hukum untuk bertindak tegas.

"Premanisme tidak bisa dibiarkan dalam bentuk apa pun. Ini harus ditindak tegas," ujar Sahroni dalam pernyataannya.

Dari sisi politik, Juru Bicara DPP PSI, Kamaruddin, mengancam keras tindakan kekerasan tersebut. Ia menilai insiden ini sebagai ancaman terhadap rasa aman warga negara dalam negara hukum.

"Kekerasan terhadap warga negara tidak dapat ditoleransi. Semua pelaku harus diproses sesuai hukum yang berlaku," kata Kamaruddin.

Kasus ini menambah daftar panjang insiden kekerasan di ruang publik yang melibatkan proses mediasi atau sengketa

ta hukum. Secara historis, fenomena kekerasan dalam penyelesaian konflik bukan hal baru di Indonesia, terutama di wilayah perkotaan dengan dinamika sosial yang kompleks.

Data nasional menunjukkan bahwa tindakan kekerasan berbasis konflik sering kali dipicu oleh ketidakpuasan terhadap proses hukum atau komunikasi yang tidak efektif. Secara internasional, lembaga seperti United Nations Office on Drugs and Crime mencatat bahwa kekerasan dalam sengketa sipil kerap terjadi di berbagai negara dengan sistem hukum yang sedang berkembang.

Di Indonesia sendiri, aparat kepolisian telah berulang kali menegaskan komitmen untuk memberantas praktik premanisme, termasuk dalam lingkungan bisnis dan jasa hukum. Upaya tersebut mencakup penindakan hukum serta penguatan pengawasan di ruang-ruang publik.

Hingga kini, pihak firma hukum yang menjadi lokasi kejadian belum memberikan keterangan resmi. Sementara itu, PSI menyatakan akan terus mengawal proses hukum agar berjalan transparan dan memberikan efek jera bagi pelaku.

Peristiwa ini kembali mengingatkan pentingnya penegakan hukum yang adil dan profesional dalam menyelesaikan setiap sengketa, guna mencegah terjadinya kekerasan yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap institusi hukum. (*)

IPSI Baubau Ukir Sejarah dengan 18 Medali di Anoa Champion 2, 10 Diantaranya Medali Emas, Buktikan Daya Saing di Tingkat Nasional



Kontingen Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Kota Baubau menegaskan dominasinya di tingkat nasional setelah meraih 18 medali dalam Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Anoa Champion 2

Laporan: Prasetio M

BAUBAU, BP - Kontingen Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Kota Baubau menegaskan dominasinya di tingkat nasional setelah meraih 18 medali dalam Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Anoa Champion 2 yang berlangsung di Kendari, Sulawesi Tenggara, pada 30 April hingga 3 Mei 2026.

Capaian tersebut terdiri atas 10 medali emas, 3 medali perak, dan 5 medali perunggu dari total 18 atlet pelajar yang diturunkan dalam tiga kelompok usia, yakni usia dini, pra remaja, dan remaja.

Keberhasilan ini menjadi indikator kuat bahwa pembinaan atlet pencak silat di Kota Baubau berjalan sistematis dan berkelanjutan, sehingga mampu bersaing di level nasional.

Kepala pelatih IPSI Kota Baubau, Djamal, menyatakan bahwa prestasi tersebut merupakan hasil dari proses latihan panjang yang dijalani atlet dengan disiplin tinggi.

"Capaian ini bukan hasil instan, melainkan buah dari kerja keras, konsistensi latihan, dan semangat juang

para atlet," ujar Djamal, Senin (4/5).

Ia menambahkan, dukungan dari orangtua dan pihak sekolah turut berperan penting dalam keberhasilan tersebut.

"Peran sekolah dan keluarga sangat besar, terutama dalam memberikan ruang dan motivasi bagi atlet untuk berkembang," katanya.

Dominasi Baubau paling menonjol terlihat pada kategori remaja. Sejumlah atlet berhasil menyabet medali emas, antara lain Siti Marwah Djamil dari SMAN 1 Baubau, Marhamdan dari SMA 5 Baubau, serta Tegar Arya Prawira, Yasni, dan Andi Sawaludin dari SMAN 5 Baubau. Ronal dari MTs Kalia Lia juga turut menyumbangkan medali emas.

Pada kategori yang sama, Wa Ode Yulianti Oba dari SMKN 4 Baubau meraih medali perak, sementara medali perunggu dipersembahkan oleh Teguh Arya Prawira, Syafitri Lia Amrin dari SMAN 5 Baubau, serta Najwa Diva dari SMKN 4 Baubau.

Sementara itu, di kategori pra remaja, Atika Sari Devi dan Muhammad Idwal dari SMPN 5 Baubau, serta

Avira Tri Adinda Mei dari SMPN 4 Baubau, berhasil meraih medali emas. Najwa Ambar Wani dari SMPN 4 Baubau menyumbangkan medali perunggu.

Adapun pada kategori usia dini putri, Jihan Hafizah dari SDN Tomba tampil sebagai peraih medali emas, sedangkan Ajeng Rahma Mukti dan Syafikah Izzatun Nisa dari SDN 7 Baubau masing-masing meraih medali perak.

Keikutsertaan atlet pelajar dalam kejuaraan ini dinilai sebagai bagian dari strategi pembinaan jangka panjang IPSI Baubau dalam mencetak atlet potensial sejak usia dini hingga remaja.

Secara historis, pencak silat telah berkembang sebagai olahraga prestasi sejak dibentuknya organisasi Ikatan Pencak Silat Indonesia pada 1948, yang kemudian menjadi motor pengembangan silat di tanah air.

Di tingkat internasional, pencak silat semakin mendapat pengakuan setelah ditetapkan sebagai Warisan Budaya Takbenda oleh UNESCO pada 2019, sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat perkembangan olahraga ini.

Selain itu, pencak silat juga telah dipertandingkan dalam ajang multi-event seperti Asian Games 2018, di mana Indonesia tampil sebagai juara umum, menandai era kebangkitan silat di panggung global.

Dalam konteks tersebut, prestasi IPSI Baubau dinilai menjadi bagian dari kontribusi daerah dalam menjaga tradisi sekaligus meningkatkan daya saing nasional di cabang olahraga pencak silat.

"Prestasi ini kami harapkan menjadi motivasi bagi generasi muda untuk menekuni olahraga secara serius dan menjauhi hal-hal negatif," kata Djamal.

Ia juga menegaskan bahwa IPSI Baubau akan terus meningkatkan kualitas pembinaan, termasuk memperluas jangkauan pelatihan dan kompetisi bagi atlet muda.

Dengan capaian ini, Kota Baubau semakin menegaskan posisinya sebagai salah satu daerah potensial dalam pengembangan atlet pencak silat di Indonesia. (*)

Dinsos Baubau dan BPJS Kesehatan Kolaborasi May Day, 300 Buruh Dapat Layanan Kesehatan Gratis



Sebanyak 300 pekerja di Kota Baubau mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis dan bantuan sosial dalam rangka peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026

Pewarta: Andina L

BAUBAU, BP- Sebanyak 300 pekerja di Kota Baubau mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis dan bantuan sosial dalam rangka peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 yang digelar oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Dinsosnaker), Senin (4/5/2026).

Kegiatan yang dipusatkan di sekitar Kantor Dinsosnaker tersebut menjadi bentuk nyata komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan sekaligus perlindungan bagi tenaga kerja.

Selain layanan kesehatan, peringatan May Day tahun ini juga diwarnai pembagian 76 paket sembako kepada pekerja kategori rentan serta penyerahan santunan kematian kepada ahli waris empat pekerja dengan nilai masing-masing Rp42 juta.

Kepala Dinsosnaker Kota Baubau, Dra. Hj. Amalia, M.Si, mengatakan kegiatan ini tetap dilaksanakan meskipun tanpa dukungan anggaran khusus.

"Kami memaksimalkan anggaran internal agar peringatan May Day tetap memberi manfaat langsung bagi pekerja, khususnya dalam aspek kesehatan dan kesejahteraan," ujar Amalia.

Pelaksanaan kegiatan yang bertepatan dengan hari kerja diantisipasi dengan sistem kehadiran bergiliran dari para pekerja agar tidak mengganggu aktivitas produksi di masing-masing perusahaan.

Sejumlah perusahaan di sekitar lokasi kegiatan juga dilibatkan sebagai peserta maupun pendukung, sehingga kegiatan berlangsung secara kolaboratif.

Dalam pelaksanaannya, Dinsosnaker bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Baubau yang melibatkan sejumlah puskesmas guna memberikan layanan medis langsung di lokasi.

Tak hanya itu, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan turut hadir memberikan edukasi kepada pekerja terkait hak-hak jaminan sosial.

"Kami ingin memastikan setiap tenaga kerja memperoleh jaminan kesehatan dan perlindungan ketenagakerjaan sesuai regulasi yang berlaku," kata perwakilan Dinsosnaker.

Amalia menambahkan, tema nasional May Day 2026 yakni "Kolaborasi Bersama Mewujudkan Kemajuan Industri dan Kesejahteraan Pekerja" menjadi landasan utama pelaksanaan kegiatan di daerah.

"Melalui semang-

kat satu tekad dan satu tujuan, kami ingin memperkuat sinergi antara pemerintah, perusahaan, dan pekerja," ujarnya.

Secara historis, peringatan May Day berakar dari perjuangan buruh di Chicago pada peristiwa Haymarket Affair yang menuntut pengurangan jam kerja menjadi delapan jam sehari.

Di Indonesia, Hari Buruh Internasional mulai diperingati sejak era pergerakan buruh awal abad ke-20, sempat ditiadakan pada masa Orde Baru, dan kembali ditetapkan sebagai hari libur nasional sejak 2013 oleh pemerintah pusat.

Momentum tersebut kini tidak hanya diisi dengan aksi unjuk rasa, tetapi juga kegiatan sosial yang menitikberatkan pada peningkatan kualitas hidup pekerja.

Di Kota Baubau, peringatan May Day 2026 diharapkan menjadi penguat kolaborasi lintas sektor dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah berbasis kesejahteraan tenaga kerja.

"Kami berharap kegiatan ini tidak sekadar seremoni, tetapi menjadi langkah konkret dalam meningkatkan kualitas hidup pekerja di Baubau," tutup Amalia. (*)